

Perkara tuntutan ganti rugi No.19,276/H.14 dan No. 6,732/H.15

Penggugat :Syamsuri dan 8,396 orang lagi

Tergugat :Pemerintah Jepang dan 3(tiga) pihak lagi

LAPORAN NARASI

Kpd yth Bidang Perkara ke-49

Di Pengadilan Negeri Tokyo

Kuasa Hukum Penggugat

Laywer Syuji Okumura

Saya menyatakan bahwa telah mewawancarai M Rasyad Dt Dandaro Sati dari Desa Batu Bersurat sebagai berikutnya :

I. Profil diri

1 Saya belahir di Desa Batu Bersurat lama pada tanggal 17 Agustus 1945, (sekarang berumur 49 tahun), kini tinggal di Desa Batu Bersurat baru bersama dengan 7 orang keluarga saya yaitu: istri saya dan anak-anak saya.

2 Berbicara tentang pendidikan saya, saya tamat dari SD(SR). Setelah tamat, saya mencari pekerjaan untuk membantu keluarga karena ayah saya sakit. Waktu saya masih muda, pekerjaan saya adalah misalnya potong kayu, cari ikan, tukang dll. 3 tahun kemudian setelah saya bekerja di Dumai waktu saya berumur 18 tahun, pulang ke desa Batu Bersurat. 1 tahun kemudian saya menikah, waktu itu saya berumur 23 tahun. Setelah pernikahan, saya membuka lahan kebun jeruk sendiri, hasilnya saya jual di Medan. Setelah itu saya memberi lagi pohon jeruk baru dengan penghasilan kebun jeruk, lalu saya jual lagi. Selama 9 tahun saya bekerja terus seperti ini. Kemudian saya sempat menjual hasil kebun jeruk di Jakarta. Di Jakarta selama 3 tahun penjualannya.

Saya menjadi Ninik Mamak waktu saya berumur 33 atau 34 tahun, kemudian dapat pekerjaan lain di desa saya, maka saya tidak sanggup lagi untuk berdagang sebab saya tidak bisa meninggalkan desa saya. Oleh karena itu, saya mulai pelihara ternak seperti 2 ekor kerbau sampai kerbaunya berjumlah 18 ekor. Dan juga saya membeli hak pengolahan kebun orang lain, membuka warung. Sebelum pindah ke lokasi baru akibat pembangunan dam ini, kehidupan saya seperti ini terus-menerus.

3 Kalau saya bicarakan posisi saya sebagai seorang Ninik Mamak, saya adalah wakli Datuk Puncak di desa Batu Bersurat yang kuasai 10 suku sebab Datuk Puncak di desa saya sakit. Sekarang ini saya sudah jadi Datuk Puncak.

4 Di kampung lama, saya punya kebun jeruk, kebun karet, kebun cengke, dan sawah. Dan juga warung. Untuk kebun karet, ada 5 kebun, dan totalnya seluas 10 ha. Kebun karet ini diolah orang lain, dan 2/3 dari penghasilan diserahkan ke orang itu, dan saya dapat Cuma 1/3 dari penghasilan. Kebun itu memproduksi sebesar 185 kg karet sehari. Di kebun ditanam pohon karet 400 batang per ha, maka jumlahnya 4.000 batang secara total. Saat kami pindah ke lokasi baru pada tahun 1996, harga pasar karet adalah 1.700 Rp per kg. Untuk kebun jeruk, saya punya 2 kebun dan totalnya seluas 4 ha. Jeruk itu hanya 1 kali panen satu tahun. Paling banyak, hasilnya sampai 11 ton per tahun. Cuma, hasil kebun jeruk itu semakin kurang menjadi 3 atau 4 ton 1 tahun sebelum pindah. Waktu pemindahan, sebelum panen karena berbunga. Saat itu bisa dijual jeruk 1 kg dengan 1.200 Rp. Untuk kebun cengke, saya punya kebun seluas 2 ha dengan pohonnya 900 batang, Cuma, cengke itu butuh 9 atau 10 tahun sampai menghasilkan, maka saya tidak punya penghasilan dari kebun cengke karena pohon cengke saya masih berumur 4 tahun. Untuk persawahan, saya punya 2 sawah, dan 2 kali panen per tahun, dan satu kali panen bisa dapat hasilnya 1.5 ton. Hasil ini biasanya untuk konsumsi sendiri, tetapi jika ada sisanya, dapat dijual di warung saya dengan 1.200 Rp per kg. Di warung, sebelum kami pindah, saya punya penghasilan sebesar 500.000 Rp – 3 juta Rp per bulan. Rata-ratanya 1,5 juta Rp.

II. Kondisi di kampung lama sebelum pindah

1 Kondisi ekonomi

Kondisi masyarakat sebelum pindah, sekiranya ekonomi itu cukup baik. Mereka biasanya punya sawah, kebun karet, ternak (ayam, kambing, kerbau, bebek). Di ladang mereka, ada penghasilan dari pisang, kelapa, mangga, manggis, durian, duku, jambu, pinang.

2 Kondisi air

Saat itu, kami mendapat air dari batang Kampar untuk minum, mandi, cuci, dll. Di samping itu, ada pula sungai lain. Jika tempat mereka jauh dari sungai-sungai itu, mereka sendiri menggali sumur. Apalagi ada beberapa kali bantuan sumur dari pemerintah Indonesia, biasanya mereka memakai air dari sungai dan sumur.

3 Kondisi lain

Ketika itu ada lebih 2.000 KK di desa kami. Ada pula pesantren besar yang bernama “dallusalam”, di mana ada siswanya sekitar 1.200 orang. Anak-anak yang sudah tamat SD/berumur 12 tahun bisa masuk ke sana, dan dapat pendidikan selama 7 tahun. Daripada orang asli, lebih banyaknya orang luar di pesantren itu. Setelah tamat dari sekolah ini, bisa saja masuk ke universitas. Maka ini bisa dikatakan lembaga pendidikan yang peluangnya besar bagi masyarakat.

III. Proses pemindahan

1 Proses penjelasan pemerintah yang tidak resmi

Saya untuk pertama kali mendengar cerita bahwa dam akan dibangun di Koto Panjang sekitar akhir tahun 1970an. Dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar 200 orang dari 8 desa di Riau di

kelurahan Batu Bersurat dimana kota pusat kecamatan XIII Koto Kampar. Di situ ada penjelasan dari camat dan wakil bupati bahwa PLTA akan dibangun di sekitar wilayah desa Pulau Gadang, dan juga bahwa akan ditenggelamkan 8 desa itu dengan adanya pembangunan tersebut. Maka waktu itu masyarakat bertanya kepada mereka, harus ke mana jika desa mereka akan tenggelam, bagaimana kalau kompensasi mereka dll, tetapi jawaban dari camat hanya singkat saja, "itu belum pasti, untuk selanjutnya mungkin dari pemerintah ada kabarnya lagi." Setelah itu rapatnya habis bebar.

Kemudian sekitar tahun 1983, ada pula rapat dengan asisten I dari bupati di kelurahan Batu Bersurat, dikumpulkan lagi tokoh-tokoh masyarakat dari 8 desa di Riau. Di situ ada batasan jumlah orang yang boleh hadir, Cuma masyarakat yang dapat undangan dari pemerintah sebelumnya. Saya memang diundang, maka ikuti rapat itu.

Di situ ada ngomongan asisten I "pembangunan PLTA ini akan tenggelamkan wilayah tempat tinggal kalian. Kami siap untuk mengganti rugi semaksimal mungkin terhadap harta-harta kalian yang akan tenggelam." Jika masyarakat tanyakan kepadanya tentang masalah lokasi baru atau ganti rugi, dia menjawab hanya "nanti, akan diputuskan soal itu", begitu saja.

Menurut penjelasannya, jelas kami harus pindah, maka soalnya apakah kami setuju pembangunan dam ini atau tidak. Waktu orde baru, di bawah pemerintah Soeharto, kami masyarakat tidak mungkin menolak langsung pembangunan dam ini, hingga kami membuat surat permohonan dengan beberapa syarat yang mau dipenuhi untuk pemindahan. Di antara masyarakat 8 desa, kami bikin surat permohonan 17 syarat, yang diajukan kepada asisten I bupati. Reaksinya, nanti kita sama-sama bicarakan soal ini, seperti itu.

Setelah itu, sampai tahun 1990, sama sekali tidak ada cerita tentang dam Koto Panjang dari pemerintah Indonesia. Saya sendiri ketika itu berpikir bahwa sedang dipertimbangkan syarat yang telah kami kasih ke pemerintah dulu walau masih ada proyek pembangunan dam ini.

2. Proses penjelasan resmi

Sekitar tahun 1990, Saleh Jasit waktu itu bupati di kab Kampar, datang ke kelurahan Batu Bersurat untuk menjelaskan pembangunan dam Koto Panjang kepada masyarakat secara resmi. Waktu itu ada masyarakat yang ikuti acara itu sekitar 2.000 orang.

Ketika itu dia menggambarkan entah bagaimana bagusnya lokasi baru walau masyarakat harus pindah akibat pembangunan dam ini. Siap rumah semi permanen, kebun karet yang sudah siap menghasilkan, harta-harta masyarakat akan diganti rugi sampai jahe di ladang, listriknya gratis. Kehidupan di kampung baru menjadi lebih baik daripada di desa lama. Ngomongannya manis sekali, tetapi tidak ada penjelasan tentang harga standar ganti rugi waktu itu.

Kemudian di Bangkinang, ada musyawarah di antara tokoh-tokoh masyarakat dengan asisten I dari bupati untuk memutuskan lokasi baru kami. Berarti saat itu sudah positif kami harus pindah. Saya sebagai wakil datang puncak hadir di situ. Dari pihak bupati, pertama ditunjukkan lokasi selatan siberuang kepada kami. Tetapi lokasi ini terlalu jauh dari desa lama dan pula wilayah tanah ulayat

orang lain, maka kami tidak bisa menerima itu. Kami melawan itu, lalu tunjukkan lokasi Ranah Sungkai di bagian wilayah tanah ulayat Batu Bersurat, dan pula lokasi selatan Batu Bersurat di bagian selatan wilayah Batu Bersurat sebagai calon pemukiman baru, yang diterima oleh pihak bupati.

3. Kesepakatan harga standar ganti rugi di Bangkinang

Pada bulan 4 tahun 1991, hanya beberapa wakil masyarakat dari setiap desa di Riau dikumpulkan di Bangkinang untuk memutuskan standar harga ganti rugi. Rapat seperti itu, tidak dikasihtahu kepada saya sebagai wakil datuk puncak di Batu Bersurat.

Di situ 2 orang Batu Bersurat yang dipilih oleh pihak pemerintah. Untuk kehadiran rapat ini, sama sekali tidak dibicarakan dulu di antara masyarakat sebelumnya. Dan 2 orang itu sepakati apa yang diputuskan di rapat sana sendirian.

Kabar ini saya dapat setelah 2 orang ini pulang ke kampung. Saya menyesali mengapa 2 orang saja Cuma ikuti keputusan harga ganti rugi di Bangkinang. Tetapi, tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keputusan yang telah berada. Di kondisi pemerintahan waktu itu, tidak bisa menkomplain keputusan ini.

Untuk perincian standar harta ganti rugi, kami tidak dikasihtahu oleh 2 orang yang hadir rapat di Bangkinang. Bayangkan saja mereka sangat takut untuk hadapi kami masyarakat karena pasti kami marah-marah, dan membantah mereka jika kami ketahui harga yang begitu tidak cocok., begitu renda sekali.

Di samping itu, kami pikirkan kondisi ini terlalu buruk, maka kami putuskan untuk menuntut, berangkatkan pak Anis ke Jakarta. Saya memang mendukung ini. Tetapi setelah dia berangkat ke sana, perubahan apa pun tidak terjadi walau dia sempat sampai ke Jepang. Hanya datang saja polisinya untuk mencari pak Anis ini ke desa kami.

4. Ganti rugi/Kesepakatan rela pindah

Sebelum disepakati harga standar ganti rugi di Bangkinang, ada pula pengukuran tanah(inventarisasi) di desa kami. Tim BPN langsung mengukur harta-harta masyarakat seperti tanah, tanaman di lapangan, dan ikut pula tim PU untuk mengukur bangunan masyarakat seperti rumah, mesjid. Masyarakat ikuti pengukuran itu supaya bisa tunjukkan harta mereka sendiri. Misalnya untuk pengukuran kebun masyarakat, diikutsertakan 4 orang lagi yang..... BPN yang mendaftarkan hasil pengukuran di lapangan, dan membawa ke kantor BPN.

Kemudian, sekitar 1 tahun setelah inventarisasi BPN mulai membuat persil masyarakat, dan pula meminta kepada masyarakat untuk tandatangani. Waktu diminta tandatangan, masyarakat Cuma konfirmasi apakah ada kesalahan dalam hasil inventarisasi kemarin, maka jika tidak ada kekeliruan, mereka langsung kasih tandatangan ke surat itu. Dan sampai saat itu, dalam suratnya belum ditulis apa pun tentang harga standar ganti rugi. Saat itu ada pula masyarakat yang mencatat nomor formulir dirinya. Sekitar 1 tahun kemudian, surat undangan untuk menerima ganti rugi dikirm oleh

BPN kepada masyarakat. Menurut undangan itu, masyarakat harus langsung ke BRI Kuok untuk menerima ganti rugi. Waktu itulah masyarakat baru mengetahui harga standar ganti rugi. Proses pemerimaannya, pertama kami menerima cek, setelah itu kami difoto. Di situ pihak bank juga mengikuti, supaya kami dapat langsung membuka rekening bank setelah kami menyerahkan cek ke pihak bank. Tetapi pembukaan rekening itu tidak harus dilakukan waktu penerimaan ini. Dan harga standar ganti rugi inilah yang membuat masyarakat kaget, lebih dari itu, marah termasuk saya sendiri.

Semenjak sekitar tahun 1993, ada 2 kali pembayaran ganti rugi. Ganti rugi yang dibayar waktu itu, dibayar untuk obyek-obyek harta yang dicatat dalam daftar ganti rugi yang dibuat pihak pemerintah. Harta-harta saya sendiri telah diukur semuanya dan dibuat formulir untuk itu, tetapi saya mendengar ceritanya bahwa ada juga masyarakat yang tidak punya formulir yang sesuai tetapi sudah selesai pembayaran ganti rugi.

Di samping itu, diminta pula untuk menandatangani ke surat rela pindah pada sekitar tahun 1992. dalam surat ini tertulis 3 pola pindah, yaitu pola ganti rugi dan pindah ke lokasi baru, pola ganti rugi saja atau pola PIR yang harus kami pilih. Saya, selaku seorang Ninik Mamak di Batu Bersurat yang tidak bisa meninggalkan tanah ulayat desa kami, maka meminta masyarakat supaya tidak memilih pilihan nomor 2 atau nomor 3.

Ketika saya sempat pergi ke lokasi baru untuk melihat kondisinya sebelum pemindahan, setelah ditandatangani surat rela pindah, saya merasa begitu kejut sebab di sana tidak dipenuhi perjanjian pemerintah. Dan merasa bahwa kami harus pindah dengan paksa, dan pula merasa tertipu oleh pemerintah.

5. Proses Pemindahan

Pada bulan Agustus tahun 1992, desa Pulau Gadang yang dipindahkan pertama. mereka sebenarnya menolak untuk dipindahkan setelah mereka juga melihat kondisi di lokasi baru sebelumnya. Walaupun saya sedang bekerja sebagai sopir, saya sempat melihat kondisi pemindahan masyarakat Pulau Gadang itu bagaimana datangnya militer dan mereka menunjukkan senapan kepada masyarakat waktu itu.

Pemindahan desa Batu Bersurat bertahap 2 kali pada tahun 1995 dan tahun 1996. sebelumnya saya sendiri, sebetulnya sudah melihat kondisi di lokasi baru. Pemukiman baru itu sama sekali tidak seperti penjelasan pemerintah yang sebelumnya. Pertama, dikatakan bahwa rumah yang akan dibangun adalah rumah yang bagus, ternyata seperti rumah untuk sementara yang punya papan di dinding itu, yang tidak terdapat fasilitas-fasilitas untuk kehidupan seperti dapur. WC adalah WC sementara, yang Cuma digali ke bawah sedikit. Dan juga kebun, itu dibakar pun belum, apalagi ditanam. Untuk fasilitas umum, menurut perjanjian, jalan desa akan diaspal, ternyata hanya jalan raya desa saja yang diaspal. Jalan biasa di desa tetap jalan tanah merah, maka kalau kehujanan, masyarakat tidak sanggup untuk melewati. Masjid, memang dibangun, tetapi kekecil-kecilan untuk

dipakai.

Walaupun saya telah mengetahui kondisi serupa ini sebelumnya, tetapi bagaimana saya bisa menolak pemindahan ini dan tetap tinggal di kampung lama sementara ada truk dari pemerintah, dan juga ada patroli dari militer dan polisi untuk pemindahan kami. Memang masyarakat menangis-nangis pindah ke pemukiman baru mereka.

IV. Kondisi desa setelah pindah

1. seperti disebut di atas, di desa Batu Bersurat lama, kehidupan masyarakat cukup makmur atau berlebih-lebih. Padinya 2 kali panen per tahun, itu mencukupi kebutuhan masyarakat, maka sebagian banyak mereka tidak perlu untuk membeli beras. Dan juga kebun karet, pohon kelapa, kebun buah seperti kopi, pisang, jeruk dsb yang mereka punyai cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan lebih dari itu, dengan menjual hasil dari kebun seperti itu mereka mendapat biaya-biaya untuk belanja atau untuk sekolah anak-anak. Sayur juga mereka tidak usah membeli. Apalagi mereka memelihara kerbau sebagai ternak mereka. Paling-paling ada puluhan ekor kerbau yang dipelihara, tetapi walaupun minimal, biasanya mereka punya 2 ekor. Jika mereka ingin suatu banyak biaya/uang, dengan menjual kerbau inilah mencukupi keinginan tersebut. Di kampung lama ekonomi masyarakat cukup bagus, maka hubungan adat/agama di antara kami cukup baik pula, kami saling menghormati. Hubungan sebagai sebuah komunitas sungguh-sungguh erat. Batang Kampar mempunyai arti penting bagi kehidupan masyarakat misalnya menjelang bulan puasa kami mandi di situ, atau kami memandikan bayi yang baru berlahir. Ada lagi untuk merayakan Lebaran, kami melakukan sebuah pertandingan sampan kecil di situ. Batang Kampar adalah sungai suci yang memandikan masyarakat secara fisik dan secara mental pula.
2. namun, sudah hilang kehidupan makmur seperti itu karena pemindahan. Masyarakat yang dipindahkan hari ke hari tetap menanggis. Demikian juga saya sendiri. Seperti tersebut di atas, di pemukiman baru sama sekali tidak ada realisasi dari perjanjian pemerintah. Saya sempat memikirkan bagaimana jadinya anak dan cucu saya di kampung baru sebelum pindah, ternyata inilah nasib yang terburuk bagi kami, saya pikir. Hampir semua masyarakat susah untuk hidup sebab dipindahkan ke kampung sekarang ini. Pertama karena kami tidak punya hasil dari kebun karet. Kerugian ini cukup besar sampai tidak terhitung. Dan kesulitan ekonomi membuat kami tidak sanggup lagi untuk memperhatikan acara-acara agama/adat kami di sini sebab hidup pun sudah di sini. Untuk laki-laki, yang paling diutamakan adalah bahwa keluarga dapat makanan sehari-hari. Di antara wanita ada pula yang menjual dirinya (pelacuran) untuk makan. Sekolah pun sulit pula untuk anak-anak seperti dulu. Setiap orang tua mengutamakan untuk membeli beras daripada menyekolahkan anak mereka. Ada banyak anak-anak yang putus sekolah karena ekonominya tidak memungkinkan lagi. Alasan besar karena belum ada hasil dari kebun karet kami.

V. Ganti rugi yang saya terima

Kondisi saya juga seperti kondisi masyarakat lain. Waktu baru pindah ke kampung baru, masih ada ganti rugi dan jadup (jaminan hidup) dari pemerintah, tetapi nyatanya pendapatan di sini berkurang 1/4 dari pendapatan dulu. Maka ketika habis jadupnya, rasanya susah sekali untuk hidup.

Sebetulnya saya berdagang sedikit sebelum pindah, maka mungkin saja sedikit bagus kondisinya daripada orang lain, tetapi saya sendiri sebagai seorang Ninik Mamak, tidak sanggup membantu kehidupan keponakan-keponakan saya.

Kalau saya memikirkan keponakan saya, saya merasa ketidakadilan yang kami hadapi ini harus diadili, maka saya juga mengikuti gugatan di Jepang.

Sekian.